



Buletin Parlamentaria

Nomor 1063/V/VII/2019 • Juli 2019



4TH
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril



4 Ketua DPR Dukung
Pemerintah Reformasi
Total Birokrasi



17 UU Dikdok Sudah Tak
Relevan



9 772614 339005

DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril

DPR RI akhirnya menyetujui permintaan pertimbangan permohonan amnesti atas nama Baiq Nuril Maknun lewat Rapat Paripurna DPR. Surat Presiden bernomor R28/Pres/7/2019 tentang permintaan pertimbangan amnesti disetujui Komisi III DPR RI secara aklamasi oleh sepuluh fraksi yang ada.

“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Dan apa yang dilakukan Baiq Nuril, dalam pandangan Komisi III adalah upaya melindungi diri dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik saat menyampaikan laporan Komisi III DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7).

Komisi III DPR RI, lanjut Erma, mempertimbangkan tiga unsur penting dalam pemberian amnesti ini, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur itu harus hadir secara proporsional agar hukum dapat menjadi panglima di Indonesia. Dan khusus amnesti untuk Baiq Nuril, ini Komisi III DPR RI mempertimbangkan unsur kemanfaatan dan keadilan yang belum terlihat.

Ditegaskan politisi Partai Demokrat ini, dalam kasus ini yang sesungguhnya menjadi korban adalah Baiq Nuril, bukan kepala sekolah yang melaporkan dirinya ke penegak hukum, karena alasan menyebarkan informasi yang melanggar kesucilaan di media sosial. Putusan PK MA memang mempersalahkan Baiq Nuril dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider tiga bulan kurungan.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi dan menghormati keputusan PK (Peninjauan Kembali) MA yang diajukan Baiq Nuril dan menolak PK Baiq Nuril itu. Namun, Komisi III juga mempertimbangkan



Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI bersama Baiq Nuril Maknun. Foto: Andri/HR

keadilan masyarakat luas bahwa Baiq Nuril adalah korban yang sebenarnya, bukan pelaku sebagaimana didakwakan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 UU ITE,” papar Erma.

Dijelaskan Erma, amnesti tidak melulu diberikan kepada seseorang yang tersangkut persoalan politik. UUD NRI Tahun 1945 juga tak menyebut amnesti hanya untuk kasus politik. Amnesti sendiri berasal dari kata *amnestia* yang berarti lupa atau *amnestos* yang berarti melupakan. Dengan amnesti tersebut dimaksudkan kasus hukum yang menimpa seseorang bisa dilupakan.

“Dalam terminologi hukum pidana, amnesti mengandung makna suatu kekuasaan untuk melepaskan seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dari pengenaan sanksi hukum akibat tindak pidana tertentu atau penghapusan akibat tindak pidana. Namun, dalam perkembangannya masih banyak pandangan klasik bahwa amnesti seolah hanya diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait persoalan politik,” urai Erma.

Dalam laporannya, Erma juga menyampaikan proses pemberian

pertimbangan amnesti di Komisi III DPR RI. Pada 23 Juli, Komisi III DPR RI menggelar rapat internal hingga menghadirkan Baiq Nuril sendiri untuk didengar keterangannya. Bahkan, pada 24 Juli sudah pula menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mendengar keterangan pemerintah terkait persoalan ini. Setelah itu barulah Komisi III DPR RI mengambil keputusan resmi.

Pada bagian akhir laporannya, Erma mendesak pemerintah agar bersama DPR RI merumuskan RUU yang mengatur amnesti dan abolisi. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya secara detail. Yang ada adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi dan aturan rehabilitasi yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Baiq Nuril hadir menyaksikan jalannya Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto ini dari balkon ruang rapat bersama anak dan kerabatnya. Ketika persetujuan amnesti dibacakan, sambutan tepuk tangan bergemuruh yang membuat Baiq Nuril dan keluarganya ikut terharu. Pimpinan DPR RI pun sempat menemui Baiq Nuril.

■ mh/sf

Industri Baja Nasional Diserbu Baja Impor

Selama 6 tahun terakhir PT. Krakatau Steel terus menerus mengalami kerugian. Selain disebabkan masalah internal perusahaan, kerugian ini juga akibat peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik pemerintah yang tidak mengeluarkan kebijakan strategis menghadapi persaingan global.

“Pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT. Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor,” kata Legislator Fraksi Partai Gerindra ini dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Rabu (17/7).

Fadli menyalahkan pemerintah yang tidak memberikan perhatian pada industri baja nasional. Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah, bagaimana bisa produk baja nasional kompetitif, jika pemerintah malah membebaskan bea masuk baja-baja impor.

“Ini menjelaskan kenapa saat Pemerintah katanya sedang *gor-goran* membangun infrastruktur, industri logam nasional kita malah terpuruk dan

bahkan sedang menuju kebangkrutan!” tegas Fadli.

Menurutnya serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan. “Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,” tandasnya.

Jika sebelumnya standar komponen lokal hanya 50 persen untuk produk non-baja dan non-besi, syarat itu kini dinaikkan menjadi 75 persen. Sedangkan untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen.

Bahkan, Fadli mengaku iri dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump dalam rangka melindungi produk-produk lokal Amerika Serikat (AS) melalui perintah eksekutif. “Kebijakan terbaru Presiden Trump ini terus terang membuat saya iri. Saat negara liberal seperti Amerika berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa,” paparnya.

Dalam aturan tersebut, memerintahkan agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi, yang tentu saja perintah itu makin memperkuat standar preferensi barang lokal AS yang harus dibeli oleh pemerintah.

■ eko/es



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: Arief/HR



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P., S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Rlyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldii Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)

Ketua DPR Dukung Pemerintah Reformasi Total Birokrasi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI mendukung kebijakan pemerintah melakukan reformasi total birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang tidak efektif. Selain itu, ke depan setiap kelahiran sebuah undang-undang tidak harus diikuti pembentukan lembaga non struktural baru. Di paruh pertama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, DPR RI dan pemerintah telah mereformasi 23 lembaga negara non struktural yang dilebur atau dibubarkan.

“Sehingga kita bisa menghemat anggaran hingga Rp 25,34 triliun. Di paruh kedua, akan ada beberapa lembaga maupun fungsi kementerian yang akan diintegrasikan. Karena pada prinsipnya, yang terpenting bukan kuantitas lembaganya, melainkan kualitas lembaganya,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, usai bertemu Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

MenPAN-RB Syafruddin menyampaikan, kedatangannya hari ini untuk mengawali pembicaraan pendahuluan mewakili pemerintah kepada DPR RI, agar bisa sejalan dalam menuntaskan reformasi birokrasi. Pemerintah merencanakan ada beberapa lembaga negara non struktural lainnya yang akan dilebur atau dibubarkan.

“Misalnya, lembaga riset dan pengawasan yang berada di instansi negara, jumlahnya cukup banyak, sekitar tujuh lembaga. Ini sedang kita kaji apakah akan dibuat satu wadah tunggal atau diintegrasikan kedalam kementerian tertentu. Perlu dukungan DPR RI agar proses melanjutkan reformasi birokrasi bisa lancar,” ujar Syafruddin.

Menyambut langkah pemerintah tersebut, Bamsoet menyampaikan, kelahiran UU Nomor 5 tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari semangat mereformasi birokrasi. Mengusung prinsip *New Public Management*, UU ASN mendorong birokrasi untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pelayanan publik.

“*Grand design* reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo harus dituntaskan, jangan berhenti pada 23 lembaga saja. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan bisa mempercepat mutu pelayanan masyarakat, menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi, sehingga bisa meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi *most-improved bureaucracy*,” tutur Bamsoet.

Lebih dari itu, politisi Partai Golkar ini mengharapkan dengan birokrasi yang efektif dan efisien, bisa membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi antisipatif dan proaktif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan zaman. Khususnya dalam memaksimalkan teknologi informasi, sehingga birokrasi bisa bergerak lincah, tidak saling bertabrakan satu sama lain.

“Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga perlu mereformasi pola pikir dan budaya kerja birokrat agar semakin profesional. Selain memberikan reward berupa tunjangan kinerja ataupun reumenerasi, *punishment* sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil juga harus diberlakukan secara tegas kepada birokrat yang melanggar aturan ataupun yang tidak menunjukkan performa,” pungkas Bamsoet. ■ sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Jaka/HR



Tim Kunspek Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Djunaidi Mahesa mengunjungi Mapolda Kalteng. Foto: Azka/HR

Polda Kalteng Dinilai Sigap Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa menilai Polda

Kalimantan Tengah (Kalteng) selalu menyukseskan peragaan berkesan. Salah satunya peragaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh personel Polda Kalteng. Menurut Desmond, Polda Kalteng menjadi salah satu contoh Polda yang baik untuk penanganan karhutla, karena memiliki personel yang sigap dan terlatih.

“Saya sudah keliling ke Polda-Polda, namun hanya Polda Kalteng yang paling berkesan. Karena setiap kunjungan saya ke Polda Kalteng pasti disuguhkan

”

**KARENA SETIAP
KUNJUNGAN SAYA
KE POLDA KALTENG
PASTI DISUGUHKAN
PERAGAAN YANG
LUAR BIASA**

peragaan yang luar biasa,” ungkap Desmond saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Kalteng, di Palangka Raya, Kamis (18/7).

Dalam peragaan pemadaman karhutla tersebut, ada beberapa cara yang diperagakan personel Polda Kalteng, mulai dari pemadaman dengan alat sederhana, hingga alat-alat modern untuk memadamkan karhutla dari skala kecil hingga besar, dan juga dipertunjukkan cara menangani massa, jika terjadi aksi huru-hara.

Turut serta dalam kunspek ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (F-PDI Perjuangan, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil (F-PKS), Adies Kadir (F-Golkar), Ichsan Soelistio (F-PDI Perjuangan), Bambang Haryadi (F-Gerindra), dan Nur Chayati (F-PKB).

■ azk/sf

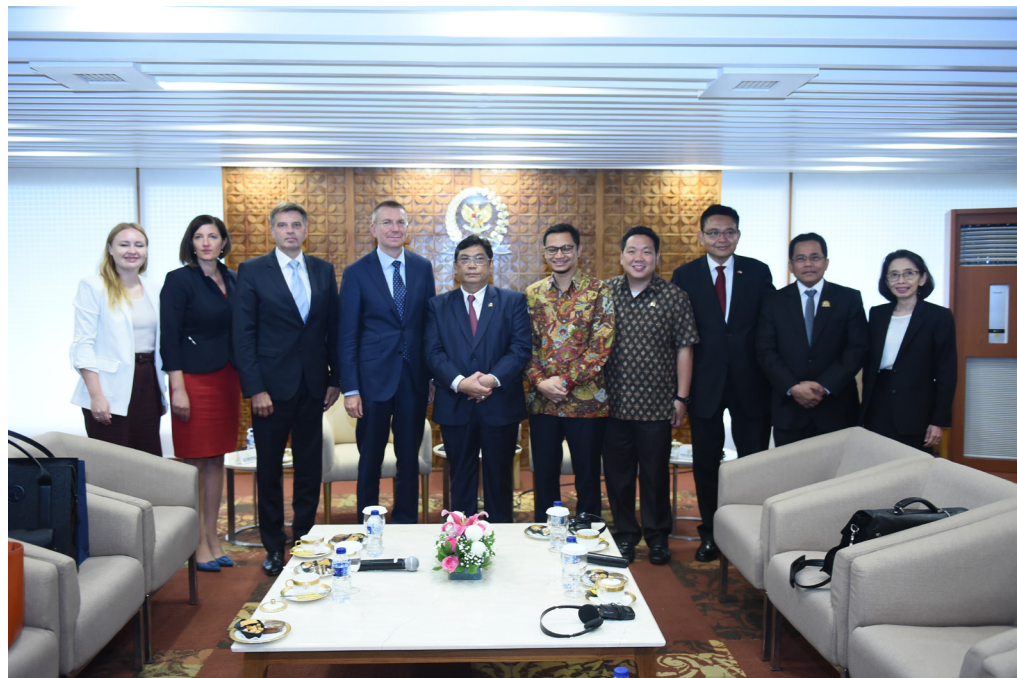
Kerja Sama Indonesia-Latvia Didorong Majukan Pariwisata

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengharapkan Delegasi Latvia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Latvia untuk dapat membantu perkembangan pariwisata di Indonesia. Utut menyatakan, menurut catatan, sekitar 4000 wisatawan Latvia datang ke Indonesia pada tahun yang lalu. Utut mengungkapkan, DPR RI sangat mengapresiasi apabila dukungan terhadap pariwisata Indonesia dari Delegasi Latvia tersebut bisa dilakukan secara *business to business* atau *government to government*.

Demikian diungkapkan Pimpinan DPR RI Koordinator Hubungan Antar Lembaga, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ini saat menerima kunjungan Delegasi Latvia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Latvia H.E. Mr. Edgars Rinkevics dan Dubes Latvia untuk Indonesia Mr. Norman serta jajaran delegasi terkait, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7).

"DPR RI akan sangat mendukung apabila Delegasi Latvia bisa secara *business to business* atau *government to government* dalam membantu pariwisata Indonesia. Menurut catatan, sekitar 4000 wisatawan Latvia datang ke Indonesia tahun lalu. Selain tujuan wisata di Bali, Indonesia memiliki banyak tujuan wisata unggulan termasuk salah satunya di Labuan Bajo dengan komodonya," ujar Utut.

Selain itu, politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, selain kerja sama di bidang pariwisata, Indonesia juga



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima delegasi Menteri Luar Negeri Latvia. Foto: Jaka/HR

membutuhkan kerja sama pada pendidikan vokasi yang tepat guna untuk mengatasi masalah kekeringan yang saat ini melanda berbagai daerah. Kekeringan ini dampak terbesarnya adalah pada tanaman pangan Indonesia utamanya padi. Padi merupakan tanaman sumber penghasil beras yang merupakan makanan utama rakyat Indonesia.

"Kami mengharapkan, Delegasi Latvia bisa membantu mengatasi masalah kekeringan di berbagai daerah tersebut dengan teknologi yang sederhana dan tentunya juga dengan harga yang terjangkau. Kekeringan ini dampak terbesarnya adalah pada tanaman pangan kita, utamanya padi penghasil beras yang merupakan makanan utama rakyat Indonesia. Saya tahu, semenjak era Uni Soviet pada masa lampau sudah

sangat hebat teknologinya," pungkas legislator dari Jawa Tengah VII itu.

Turut hadir mendampingi Utut, diantaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais (Fraksi PAN) dan Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan). Pertemuan ini juga dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Swedia merangkap Latvia R. Bagas Hapsoro dan Pejabat Fungsi Politik, Protokol, dan Konsuler Ernest Hadinoto.

Sementara Menteri Luar Negeri Latvia H.E. Mr. Edgars Rinkevics, didampingi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Latvia untuk Indonesia H.E. Mr. Normans Penke, Kepala Kantor Menteri Latvia Ms. Ieva Apine, dan *Third Secretary Of The Asia And Oceania Divisio*, MFA Ms. Aleksandra Grevceva. ■ pun/sf

Legislator Usulkan Sumber Dana Pembiayaan Proyek 4000 BTS

Program 4000 *Base Transceiver Station* (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah yang masuk dalam proyek perencanaan strategis nasional.

Program penyediaan BTS oleh Kementerian Kominfo di daerah *blankspot* merupakan salah satu program USO (*Universal Service Obligation*) Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika dibangun dengan menggunakan dana USO yang dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri mengatakan, karena program 4000 BTS tersebut sudah menjadi proyek strategis nasional, maka pemerintah pasti telah memperhitungkan sumber

pendanaannya. “Pemerintah harus bertanggungjawab mengenai keuangannya. Saya usul sumber pendanaannya yaitu 10 persen dari USO dan 90 persennya berasal dari APBN,” ujar Budi saat Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo Rudiantara beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Jika memang harus diperkuat, sambungnya, maka diusulkan agar Komisi I DPR RI memanggil Menteri Keuangan. “Kalau ini menjadi proyek strategis nasional, maka negara harus disiplin,” tegasnya.

Penyediaan BTS di daerah *blankspot* sendiri awalnya merupakan usulan dari pemerintah daerah dan diimplementasikan melalui kerja sama antara BP3TI, Pemda, perusahaan penyedia transmisi, *power* dan *tower* serta operator seluler. Mekanisme kerja



Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri. Foto: Arief/HR

sama yang digunakan adalah melalui sewa layanan, dimana BP3TI membiayai layanan transmisi, *power* dan *tower* sedangkan Pemda meminjamkan lahan dan operator seluler menyediakan dan mengoperasikan perangkat BTS.

Pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika di wilayah *blankspot* ini diharapkan dapat memperkuat dan daerah-daerah dalam kerangka negara persatuan. ■ def/es

Laju Ekonomi Indonesia Tetap Positif di Tengah Ketidakpastian Global

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu memandang perekonomian Indonesia pada Semester 1 tahun 2019 masih menunjukkan momentum positif di tengah perlambatan kinerja ekonomi di negara maju. Hasil positif ini ditopang permintaan domestik yang mampu mengompensasi kinerja ekonomi Internasional.

Hal itu diungkapkan Iskandar saat membacakan laporan Panja Perumus Kesimpulan Realisasi Pelaksanaan APBN tahun 2019 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

“Hasil positif ini ditopang oleh permintaan domestik yang mampu

mengkompensasi turunnya kinerja perdagangan internasional. Kuatnya permintaan domestik tidak terlepas dari keberhasilan menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat serta realisasi berbagai program pemerintah yang telah diagendakan dalam APBN,” papar Iskandar.

Banggar pun memahami melemahnya perekonomian negara maju, terutama Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok yang antara lain sebagai dampak dari kebijakan proteksionisme dan perang dagang serta ketidakpastian implementasi *bretxit* di Eropa, juga berimbas pada iklim ekonomi dan pelaksanaan APBN 2019.

“Tren harga komoditas dunia yang relatif lebih rendah dibanding tahun 2018, meskipun terdapat risiko tekanan dari sisi geopolitik yang berpotensi meningkat juga berdampak terhadap

pelaksanaan APBN 2019,” lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Meski demikian, legislator dapil Jawa Timur X itu meminta pemerintah untuk tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia masih akan terjaga hingga tahun 2019. Hal ini guna sebagai pijakan penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan fiskal di tahun 2020 mendatang. ■ hs/sf



Anggota Banggar DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu. Foto: Andri/HR

Harus Ada Koordinasi dengan Kepolisian Tangani Impor Plastik Limbah B3

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan dalam menangani puluhan kontainer plastik impor yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus ada koordinasi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bea Cukai dengan penyidik dari Kepolisian.

“Kita melihat langsung kondisi kontainer yang berisi limbah plastik yang mengandung limbah B3, dan ingin mengetahui secara detail penanganan kasus hukumnya terutama koordinasi PPNS dengan kepolisian, apakah ada unsur pidana dalam proses masuknya plastik yang terkontaminasi limbah B3 ini,” ungkapnya di Mapolda Batam, usai meninjau kontainer plastik impor yang mengandung limbah B3 yang ada di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepri, Selasa (23/7).

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Gerindra itu meminta agar kontainer yang berisi limbah plastik bercampur limbah B3 dilakukan ekspor kembali ke Negara asalnya karena dinilai tak layak dan melanggar hukum. Selain itu akan mengganggu dan tidak sejalan dengan semangat bersama untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia.

“Persoalan kontainer yang berisi sampah plastik mengandung limbah B3 ini sudah menjadi pembicaraan nasional, tadi dari pengakuan pemilik barang mengaku bahwa kontainer tersebut bukan berisi plastik namun

berisi bahan baku. Ini kita serahkan kepada penyidik untuk menyimpulkan, bila terbukti sampah maka ini melanggar peraturan perundang-undangan dan kontainer-kontainer tersebut harus dikembalikan ke Negara asalnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Kepri Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa kasus impor limbah plastik yang mengandung B3 tersebut ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sesuai dengan lingkup kewenangan undang-undang. Meski demikian, PPNS tetap melakukan koordinasi dengan Kepolisian guna mengungkap permasalahan tersebut.

“Untuk penyidikan kasus kontainer impor sampah plastik bercampur limbah B3 dilakukan oleh PPNS Bea Cukai namun tetap dilakukan koordinasi dan dibawah pengawasan dari kepolisian,” jelas Budhi.

Diketahui, setidaknya ada 65 kontainer impor plastik yang diduga mengandung limbah B3, namun setelah dilakukan telah dinyatakan ada 38 kontainer limbah plastik mengandung B3, 11 kontainer limbah plastik tercampur sampah dan 16 kontainer lainnya tidak mengandung B3 dan tidak tercampur sampah.

■ skr/es



Tim Kunspek Komisi III DPR RI meninjau kontainer plastik impor di Pelabuhan Batu Ampar. Foto: Singgih/HR

Komisi IV Dukung Penyegegelan Aktivitas Perusakan Hutan Lindung di Batam

Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penyegegelan aktivitas penyalahgunaan hutan lindung di Batam oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit 2 Kota Batam mendata ada sekitar 40 titik hutan lindung yang rusak. Ini yang menjadi alasan Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Batam.

Kunspek ini dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPR RI Effendy Sianipar, setelah melakukan rapat dengan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan dari Pemprov Kepulauan Riau, perwakilan dari Pemko Batam, serta melibatkan ototitas BP Batam, semuanya sepakat menyatakan bahwa aktivitas alih fungsi hutan lindung tersebut liar tanpa izin.

“Tidak ada izin dari semua elemen. *Enggak* ada izin nya dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), *enggak* ada izin dari Pemprov, *enggak* ada izin dari otoritas, jadi liar benar ini,” tandas Effendy setelah meninjau langsung kondisi kerusakan lahan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Senin (22/7).

Komisi IV DPR RI memantau langsung mengenai tindak lanjut pelaksanaan penanganan kasus alih fungsi kawasan hutan lindung bakau, serta upaya-upaya pengendalian dan pencegahan kasus serupa di wilayah



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Batam. Foto: Eko/HR

lain di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK.

Sebagaimana telah diketahui, hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Di kesempatan yang sama Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sustyo Iriyono menyampaikan, kegiatan ilegal ini sebelumnya telah dihentikan, hari ini telah ditindak tegas dengan menyegegel

dan selanjutnya akan dibawa ke ranah hukum. “Kemudian setelah penyegegelan penghentian aktivitas, akan dibawa ke ranah hukum karena telah melakukan pelanggaran undang-undang,” ujar Iriyono.

Adapun pelanggaran yang dituntut adalah Pasal 98 dan 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Serta tuduhan melanggar Pasal 98 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta pidana, dan denda paling banyak Rp 15 miliar. ■ eko/es

Penerapan Program BPNT Melalui E-Warong Terkendala Perangkat Elektronik

Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono menilai kebijakan pemerintah terkait pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) masih terkendala perangkat elektronik. Karena masih banyak di daerah e-warong yang belum memiliki perangkat elektronik yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau non tunai.

Demikian diungkapkan politisi Fraksi Partai Demokrat itu ketika mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional (Divre) Sulawesi Selatan, di Makassar, Senin (22/7).

“Sejatinya program BPNT ini sangat baik untuk menanggulangi kemiskinan. Namun sayangnya di desa-desa masih ada warung yang belum memiliki perangkat elektroniknya. Tentu ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ketika mereka ingin menggunakan KKS untuk pengambilan bantuan pangan di e-warong serta melakukan transaksi pembelian bahan pangan lainnya,” ujar Guntur.

Diketahui, e-warong merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur bantuan dan sudah ditentukan sebagai tempat pencairan, penukaran dan pembelian bahan pangan oleh KPM. Seperti di pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Selain itu, Politisi dapil Jawa Timur VIII ini berharap agar Badan yang dikepalai oleh Budi Waseso tersebut (BULOG), kembali dilibatkan sebagai penyedia dan pendistribusi beras sejahtera (Rastra) dalam program BPNT. Hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam menyikapi banyaknya stok beras (baik yang berasal dari dalam dan luar negeri) yang ada di gudang milik BULOG.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengadaan Bulog, Bachtiar yang ikut dalam kunjungan ke Sulawesi Selatan tersebut menjelaskan berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia beberapa waktu lalu, BULOG kembali dipercaya menjadi penyedia rastra dalam program BPNT.

“*Insyallah* bulan september 2019 mendatang BULOG kembali menjadi

penyedia Rastra BPNT. Hal itu tertuang dalam surat edaran Mensos 01/MS/07-2019. Ini menjadi hal yang positif untuk menyeimbangkan stok BULOG antara hulu dan hilir,” terangnya.

Ia menambahkan, serapan beras dari masyarakat dalam negeri yang cukup tinggi, ditambah beras impor, sehingga membuat stok beras BULOG menjadi banyak. Bahkan ada yang sudah lebih dari satu tahun tersimpan di Gudang BULOG. “Impor pertama pada bulan April 2018, sekarang sudah Juli 2019. Jadi sudah 1 tahun lebih 3 bulan beras impor tersebut ada di Gudang BULOG,” jelas Bachtiar.

Meski demikian, lanjut Mantan Pangdam VII/Wirabuana (sekarang Pangdam VII Hassanudin, Sulawesi Selatan) ini, ia menjamin kualitas dan mutu Beras BULOG tetap tinggi. Hal ini sekaligus mengklarifikasi adanya anggapan bahwa beras BULOG itu buruk. ■ **ayu/es**



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI bersama jajaran Bulog Divre Sulsel. Foto: Ayu/HR

Sumut Kini Surplus Listrik

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini sudah mengalami surplus listrik sejak 2017. Surplus ini menumbuhkembangkan industri di



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu.
Foto: Husen/HR

Sumut hingga Aceh. Sebelumnya, ada defisit listrik yang mengakibatkan pemadaman bergilir. Kondisi ini tentu sangat mengganggu mobilitas masyarakat dan industri.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan, pada tahun 2015 Sumut sempat defisit listrik. Dan Kota Medan selalu mengalami pemadaman bergilir. Itu ironis sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Industri setempat juga banyak gulung tikar.

“Sebagai Ketua Komisi VII saya mengawal elektrifikasi yang sejak 2015-2016 masih defisit. Pada 2017 hingga sekarang sudah surplus,” jelas Gus Irawan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Langkat, Sumut, Senin (22/7).

Kemajuan elektrifikasi di Sumut seiring beroperasinya beberapa pembangkit listrik seperti Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Sarula 3x110 megawatt dan terakhir beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pangkalan Susu, Langkat 2x200 megawatt.

“Dengan kondisi listrik yang sudah surplus seperti sekarang, industri di Sumut tumbuh berkembang hingga ke Aceh, karena sejak 2017 sudah surplus,” tutur legislator asal Sumut tersebut. Walau sudah surplus tapi di beberapa titik diakui memang masih ada pemadaman bergilir.

Persoalannya bukan pada defisit listrik, melainkan belum ada gardu dan transmisi yang dibangun untuk menyalurkan listrik. Kini, dengan surplus listrik, industri bergeliat pesat dan aktivitas warga juga tak terganggu. Dengan telah beroperasinya beberapa pembangkit listrik, Sumut bisa membantu elektrifikasi nasional, setidaknya di Pulau Sumatera. ■ mh/sf

Biaya Logistik Mahal, Batam Kalah Bersaing dengan Singapura

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi Free Trade Zone (FTZ) memiliki masalah saat bersaing dengan Singapura, karena tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Prosedur yang rumit juga menghambat proses pengiriman barang ke luar negeri.

“Persoalan utama yang di Batam ini setelah ditetapkan menjadi FTZ yaitu pelabuhan yang belum bisa menunjang kebutuhan, seperti lamanya proses bongkar muat kontainer, serta mahalanya *logistic cost*,” tutur Dito saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina, BP. Batam, Peliindo I dan Pengusaha Daerah Industri Pulau Batam, di Batam, Kepri, Kamis (11/7).

Pelabuhan Batu Ampar yang berseberangan langsung dengan

Singapura, dinilai sudah tidak efisien dan harus segera diperlebar. Masalah yang selama ini dihadapi bukan biaya pengiriman yang tinggi, melainkan biaya *handling cost*, penumpukan di terminal serta biaya standardisasi di terminal.

“Prosesnya saat ini sangat lama dan harus ke Singapura dulu untuk standardisasi, padahal bisa dikerjakan di Batam.

Serta *crane* yang digunakan untuk bongkar muat hanya bisa lima kontainer per jamnya. Jika ingin bersaing dengan Singapura, kita harus memperbaiki pelabuhan ini,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Dalam kesempatan itu, Kepala BP. Batam Edy Putra Irawady menuturkan, permasalahan yang dihadapi BP. Batam antara lain belum memiliki *consolidated container* yang berguna untuk tempat kontainer kosong yang siap dikirim



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto.
Foto: Rryan/HR

kembali ke Singapura. “Selama ini ketika kami akan kirim barang harus memesan kontainer kosong ke Singapura. Padahal itu tidak perlu jika di Batu Ampar tersedia, dan itu akan memangkas biaya,” tutur Edy.

Selain itu, investasi di Batam banyak yang masuk, namun permasalahan pengiriman barang menjadi permasalahan tersendiri. Batam harus membenahi logistik, mengingat hampir semua barang masuk melalui Batam.

■ rh/sf



Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan direksi PT. SEI di Gresik, Jawa Timur. Foto: Jaka/HR

Komisi VII Dorong PT. SEI Percepat **Produksi Migas**

Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam mendorong PT. Saka Energi Indonesia (SEI) melakukan percepatan produksi minyak dan gas (migas). Peralnya, saat ini Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan di sektor migas. Hal ini dipicu ekspor migas menurun, karena produksi migas Indonesia mengalami penurunan, sedangkan angka impor makin tinggi.

“Saya berharap ada langkah-langkah terobosan yang serius, karena di sini memiliki fasilitas

bagus yang bisa menghasilkan LPG, BBM dan minyak mentah. Jika dimanfaatkan secara maksimal, PT. Saka Energi Indonesia bisa menyumbang produksi untuk mengurangi defisit neraca perdagangan,” tandas Syaikhul saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PT. SEI di Gresik, Jawa Timur, Senin (22/7).

Menurut politisi PKB ini, kendala PT. SEI sendiri terkait pemanfaatan lokasi gas belum maksimal, dikarenakan hanya mengandalkan Lapangan Ujung Pangkah milik PT. SEI sendiri. Padahal di sini

ada cadangan gas yang masih bisa dieksplorasi. “Kalau eksplorasi memang selalu kita suarakan, baik kepada Menteri ESDM maupun Kepala SKK Migas,” imbuhnya.

Legislator dapil Jatim itu pun mendorong seluruh *stakeholder* untuk mempunyai satu pandangan bersama dalam memikirkan energi ke depan, sehingga tidak bergantung pada impor. Ia menginformasikan, PT. SEI mengakuisisi sejumlah saham milik Hess Oil and Gas Holdings Inc dan Hess NWE Holdings di Hess Pangkah LLC senilai 650 juta dollar AS. ■ jk/sf

PJB Paiton Layak Dapatkan Proper Emas

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton merupakan salah satu objek vital nasional yang menjadi pemasok listrik terbesar bagi Pulau Jawa dan Bali, yakni kurang lebih sebesar 17 persen. PT. Pembangunan Jawa Bali (PJB) sebagai salah satu operator PLTU Paiton telah dua kali mendapatkan Proper Emas, dan hal itu memang dianggap layak, karena PJB Paiton dinilai baik peran aktifnya dalam menjaga lingkungan alam sekitarnya.

“Biasanya kita melihat industri-industri besar dan strategis yang kita temui seringkali melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Namun berbeda dengan yang ada di PLTU Paiton, dimana setelah kita melihat di lapangan, ternyata lingkungannya sangat bagus sekali. Sehingga layak apabila mendapatkan Proper Emas,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (19/7).

Ridwan mengatakan, implementasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) PLTU Paiton terhadap lingkungan hidup, maupun lingkungan di sekitar pabrik yang dilakukan oleh PJB telah dilakukan dengan baik. Lingkungan pantai yang ada sangat bagus dan tetap dijaga keindahannya, serta dijadikan objek wisata pantai, yang di dalamnya terdapat coral-coral yang selalu dirawat kelestariannya.

“Meski demikian masih ada sisi negatif yang terjadi, yaitu masih ada 600 kepala keluarga yang tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang dekat dengan PLTU Paiton namun belum dapat merasakan dan menikmati pasokan aliran listrik. Ini sungguh ironis

sekali,” tandas politisi Partai Golkar itu.

Indeks elektrifikasinya juga masih kecil, baru sebesar 88 persen, padahal tingkat nasional sudah mencapai 96 persen. Ridwan memastikan, hal itu akan menjadi perhatian Komisi VII DPR RI. Pihaknya akan meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk segera mengambil langkah-langkah, agar ketimpangan keadilan masyarakat ini bisa segera diatasi.

“Sesungguhnya pembangunan yang dilakukan adalah untuk membawa kemakmuran, tetapi di lain pihak ada masyarakat yang merasakan ketidakadilan. Di sekitar mereka ada listrik yang besar dan mampu mengaliri kebutuhan listrik se-Jawa Bali, sementara di rumah

mereka sendiri tidak memiliki aliran listrik,” tandas Ridwan.

Indonesia harus maju dengan makmur berkeadilan, lanjut Ridwan. “Hal itulah yang perlu untuk diperbaiki, dan ini juga merupakan masukan dari Bupati Probolinggo yang disampaikan langsung kepada kami,” imbuh legislator dapil Jawa Timur V itu.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki PLTU yang usianya telah mencapai seperempat abad. PLTU tersebut adalah Paiton unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 40 megawatt (mw), di Probolinggo, Jatim. PLTU Paiton unit 1 dan 2 dikelola oleh PT. PJB, anak usaha PT. PLN (Persero). Kawasan Paiton memiliki luas sekitar 400 hektar yang diapit Probolinggo dan Situbondo. Kawasan Paiton memiliki sembilan unit pembangkit dengan berbagai macam operator atau pengelola. ■ dep/es



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Foto: Dewi/HR

PTAI Kesulitan Ciptakan SDM Berkualitas



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid bertukar cenderamata dengan mitra kerjanya. Foto: Geraldi/HR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menuturkan bahwa Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) saat ini masih kesulitan dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Sebab utamanya adalah masalah regulasi otonomi program studi yang masih mengalami kendala.

Hal tersebut ia kemukakan ketika memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, di Bandung, Senin (22/7). Pertemuan ini membahas rencana pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam Kemenag.

“Permasalahan terutama regulasi pendirian Program Studi masih mengalami banyak kendala. Selain itu status PTAI di lingkungan Kementerian Agama juga masih memerlukan peningkatan status. Hal ini menyebabkan PTAI masih mengalami kesulitan dalam melahirkan SDM yang kompetitif,” ungkap Sodik.

Politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa status PTAI bisa mengalami peningkatan status dengan catatan telah memenuhi persyaratan baik administratif maupun akademis. Misalnya dari PTAIS menjadi STAIN, dari STAIN menjadi IAIN, serta dari IAIN menjadi UIN.

Sodik mengakui pentingnya aspek peningkatan kualitas pendidikan,

dengan melihat berbagai kepentingan pengembangan kelembagaan dan akademik, seperti pengembangan SDM dan pengembangan sarana dan prasarana di PTAI. Untuk itu diperlukan keberpihakan DPR RI dan pemerintah untuk kebijakan anggaran.

“Kesepakatan DPR dan Pemerintah dalam hal ini penting kiranya memihak kepentingan pengembangan tersebut, dengan meningkatkan anggaran Kemenag, khususnya sektor pendidikan tinggi. Melalui pembentukan Panja Pendidikan Tinggi Agama Islam ini untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi di Perguruan Tinggi Agama Islam selama ini,” pungkas Sodik. ■ *opi/sf*

JCH Harus Waspadai Suhu Tanah Suci

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengingatkan, Jemaah Calon Haji (JCH) harus mewaspadai suhu ekstrim yang ada di tanah suci Arab Saudi. Diprediksi, ketika pelaksanaan Haji suhu akan mencapai kurang lebih 50 derajat celsius. Untuk itu Erma, sapaan akrabnya, juga memastikan bahwa JCH Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah dibekali bimbingan untuk beradaptasi dengan kondisi geografis di Arab Saudi.

Ditemui usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Asrama Haji Samsuddin Noor, Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (22/7/2019),

Erma menjelaskan bahwa JCH di Banjarmasin ini memiliki tingkat risiko hingga 65 persen. Hal tersebut menurutnya menjadi tantangan bagi penyelenggara kesehatan.

“Kita dengar di sini risikonya sampai 65 persen. Itu kan menjadi PR sendiri bagi teman-teman yang melakukan pelayanan kesehatan. Ibadah tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik kalau kondisi jemaah itu tidak berada dalam keadaan prima. Oleh karena itu Komisi IX harus meyakini bahwa pelayanan kepada para calon jemaah diberikan sebaik-baiknya,” tutur Erma.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebutkan bahwa dengan

suhu tinggi tersebut, diharapkan para *stakeholder* penyelenggara Haji telah berbagi tips kesehatan kepada JCH. Ia menyampaikan, apabila lalai, jangan harap jemaah embarkasi Banjarmasin dapat menjalani ibadah dengan keadaan yang prima.

“Berhadapan dengan temperatur yang luar biasa tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dipesankan (kepada JCH) minum yang banyak, jangan takut kencing, bawa semprotan kemana-mana (untuk) basahi muka, makan buah, jangan keluar pondokan jika tak diperlukan. Itu tips-tips sederhana, terlihat sederhana, tapi memang harus dilakukan,” imbuh politisi dapil NTB tersebut. ■ *er/sf*



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengunjungi Asrama Haji Samsuddin Noor, Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto: Erlangga/HR

Dewi Asmara Dilantik Menjadi Wakil Ketua Komisi IX



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyerahkan palu pimpinan persidangan kepada Wakil Ketua Komisi IX yang baru dilantik, Dewi Asmara. Foto: Kresno/HR

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto memimpin rapat pergantian pimpinan Komisi IX DPR RI yang semula dijabat oleh Ichsan Firdaus digantikan oleh Dewi Asmara. Pergantian Wakil Ketua Komisi IX ini atas usulan dari Fraksi Partai Golkar yang telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI, pada tanggal 28 Juni 2019, di dalamnya termaktub tentang usulan pergantian Wakil Ketua di Komisi IX.

“Dan hal ini sesuai dengan Pasal 57 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi. Untuk itu apakah usulan dari Pimpinan Fraksi Partai

Golkar sebagai mana tersebut di atas dapat disetujui?” tanya Utut kepada para Anggota Komisi IX DPR RI, serentak dijawab, “setuju!”. Ketukan palu pimpinan sidang menjadi tanda pengesahan, dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).

Penetapan pimpinan ini berdasarkan pada Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pemilihan Pimpinan Komisi sebagai mana dimaksud pada ayat dua dilakukan dalam rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan DPR RI, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi.

Setelah melantik Wakil Ketua Komisi

IX yang baru, Utut mengucapkan selamat kepada Dewi Asmara. “Kami atas nama pribadi maupun atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan, ucapan selamat kepada saudari Dewi Asmara yang dipercaya untuk menjadi Pimpinan Komisi IX DPR RI,” papar Utut.

Dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ichsan Firdaus atas kinerjanya selama ini. “Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Ichsan Firdaus atas kepemimpinannya selama ini, semoga selalu sukses dalam menyumbangkan darma baktinya untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Utut.

■ eko/sf

UU Dikdok Sudah Tak Relevan

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama saat ini Indonesia yang sudah memasuki revolusi industri 4.0. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menginginkan UU Dikdok perlu direvisi.

Beberapa substansi yang perlu direvisi antara lain pendirian Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi; seleksi calon mahasiswa; pembiayaan pendidikan kedokteran; standar kompetensi dokter; dokter magang; uji kompetensi; adaptasi; pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan; ijazah; sertifikasi; kompetensi, sertifikasi profesi; organisasi profesi; konsul kedokteran Indonesia; Dokter Layanan Primer; dan distribusi dokter.

“Kami menerima masukan perubahan UU ini untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran dan menciptakan kelulusan dokter yang dipandang di mata internasional nantinya. Jadi, kita berharap pemerintah menyediakan sarana prasarana yang memadai menghadapi revolusi 4.0 ini,” jelas Djoko di sela-sela RDP Komisi X DPR RI dengan Pengurus IDI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Terkait biaya masuk fakultas pendidikan kedokteran yang mahal, Djoko menilai hal ini akan terus terjadi sampai pemerintah bisa menyediakan sarana prasarana yang memadai. “Sepanjang pemerintah tidak mempersiapkan sarpras, tentunya secara tidak langsung mahasiswa yang masuk FK yang akan dibebankan. Ke depan kita harap standar FK memiliki sarpras yang sama, sehingga menghasilkan dokter yang kompeten,” tuturnya.

Saat ini, lanjut legislator Partai Demokrat itu, Komisi X DPR RI masih menunggu pengajuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah untuk dibahas bersama. “Komisi X sudah menerima surat penugasan dari Ketua DPR RI sejak 15 Januari 2019, namun sampai saat ini kami masih menunggu DIM dari Pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I PB Pengurus IDI Abid Khumaidi menyebutkan terdapat 8 kelemahan dalam UU Dikdok, sehingga perlu ada perubahan secara fundamental terhadap UU tersebut. Pertama, tidak mengatur pembukaan dan penutupan FK, sehingga diduga banyak terjadi penyimpangan. Kedua, pengaturan RS pendidikan bertentangan dengan kaidah pendidikan itu sendiri, serta bertentangan dengan pelayanan JKN.

Ketiga; tidak ada pasal dalam UU Dikdok yang mengatur tentang pengawasan fungsional FK, sehingga terjadi celah dalam disparitas

kualitas pendidikan. Keempat, UU ini tidak mengakomodir subsistem pemerataan distribusi dokter di Indonesia. Kelima, UU Dikdok tidak mendukung konsep komprehensif kesehatan wilayah. Keenam, UU tidak sesuai dengan filosofi pendidikan kedokteran yang dianut oleh 3000 FK yang terhimpun dalam World Federation of Medical Education (WFME).

Ketujuh, UU ini tidak memperhatikan potensi dan peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan FK. Terakhir, pendidikan spesialis juga tidak diatur dalam UU Dikdok, sehingga menghambat dinamika pengembang. “Kita sudah memiliki dokter umum sebanyak 138.000. Jumlah dokter yang terdaftar di konsil sebanyak 17000 dan potensi penambahan dokter per tahun sekitar 13.000. Yang akan menjadi kekhawatiran, dalam memproduksi dokter, bisa mengakibatkan pengangguran, karena tidak adanya peraturan dalam produksi dokter,” tutupnya. ■ mm/sf



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto saat RDP Komisi X DPR RI dengan Pengurus IDI. Foto: Odjie/HR

Penerimaan Negara Sektor Perikanan Masih Minim

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyayangkan sumbangsih sektor perikanan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai belum optimal. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya maritim yang cukup besar.

Demikian diungkapkannya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Direktur PNBP Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan NTT Untung Basuki, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi di Bali, Senin (22/7).

“Kita belum melihat optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui perikanan, ini luput dari perhatian kita. Karena kita menyaksikan begitu banyak sumber daya alam kita, tetapi sumbangsihnya ke APBN masih sangat minim,” ujar Hafisz.

Politisi PAN itu menuturkan, PNBP merupakan salah satu sektor yang menjanjikan untuk penerimaan negara, selain pajak. Sehingga melalui PNBP diharapkan dapat menyelamatkan APBN dari defisit anggaran dan keseimbangan primer negatif.

Untuk itu, ia mendorong optimalisasi PNBP di berbagai sektor, termasuk perikanan. Menurutnya, selama 5 tahun terakhir kontribusi PNBP perikanan belum pernah mencapai target. Misalnya pada tahun 2018, PNBP sektor perikanan hanya mencapai Rp 431,83 miliar dari target Rp 600 miliar.

“Untuk sektor perikanan terbukukan Rp 600 miliar, sementara menurut pakar sumber *resources* laut kita bisa mencapai Rp 38 triliun, ini

”

KITA BELUM MELIHAT OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MELALUI PERIKANAN, INI LUPUT DARI PERHATIAN KITA. KARENA KITA MENYAKSIKAN BEGITU BANYAK SUMBER DAYA ALAM KITA, TETAPI SUMBANGSIHNYA KE APBN MASIH SANGAT MINIM,”

hanya sektor perikanan saja. Nah, maka ini yang harus kita kejar, “ tandas legislator dapil Sumatera Selatan itu.

Sementara itu, Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo menyampaikan salah satu faktor kendala dalam pengelolaan PNBP sektor perikanan adalah Harga

Patokan Ikan (HPI). Menurutnya, HPI yang berlaku saat ini masih sama dengan tahun 2012, atau belum pernah mengalami penyesuaian dengan perkembangan harga jual rata-rata yang berlaku di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, perhitungan PNBP masih didasarkan pada Gross Tonage (GT) Kapal, alat-alat tangkap yang digunakan dan wilayah penangkapan ikan, sehingga PNBP yang diterima kemungkinan tidak optimal karena bukan dihasilkan dari volume riil ikan yang ditangkap. ■ *ann/sf*

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Ane/HR



Pengawasan Teluk Bayur Harus Diperketat



Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: Puntho/HR

”

**HARUS ADA
UPGRADING SDM
APARAT BEA
CUKAI BAIK
INTELIJEN MAUPUN
PENYIDIK DARI BEA
CUKAI. KARENA,
MODUS-MODUS
PENYELUNDUPAN
BARANG ILEGAL
TENTU AKAN TERUS
BERKEMBANG.**

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendorong Bea Cukai Teluk Bayur ditingkatkannya pengawasan terhadap potensi penyelundupan barang ilegal, terutama rokok tanpa cukai, rokok dengan cukai palsu, narkoba serta barang ilegal lainnya di wilayah kerjanya. Ecky menyatakan, pengawasan tersebut juga harus diketatkan karena masuknya barang ilegal sangat mengganggu perekonomian dalam negeri, dalam hal penerimaan negara.

Hal itu disampaikan Ecky usai meninjau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Teluk Bayur bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Teluk Bayur Hilman Satria di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (22/7).

“Untuk pihak Bea Cukai Teluk Bayur di wilayah Sumbar ini, kami mendorong agar (pengawasan)

terkait rokok tanpa cukai, maupun rokok dengan cukai palsu untuk lebih diketatkan. Karena, masuknya barang ilegal tersebut mengganggu penerimaan negara yang tentunya berdampak pada perekonomian negara,” tutur Ecky.

Selain itu, Legislator dapil Jawa Barat III ini juga menyoroti Bea Cukai Teluk Bayur yang masih memiliki anggapan bahwa risiko penyelundupan di Teluk Bayur masih tergolong rendah dibandingkan wilayah lainnya. Padahal, lanjut Ecky, hal tersebut justru itu bisa menjadi kesempatan para penyelundup ini untuk melihat kelengahan dari Bea Cukai Teluk Bayur.

“Risiko penyelundupan di sini oleh pihak Bea Cukai Teluk Bayur dianggap rendah daripada di Cengkareng, kemudian Sumut dan Bali. Justru itu bisa jadi kesempatan para penyelundup ini untuk melihat kelengahan dari Bea Cukai yang memandang bahwa ini tidak ada risiko. Padahal, sesungguhnya tetap

saja yang namanya rokok tanpa cukai, narkoba dan barang ilegal harus tetap diawasi secara ketat agar tidak masuk wilayah Sumbar,” tandas Ecky.

Untuk itu, pada kesempatan yang sama, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau Bea Cukai Teluk Bayur beserta *stakeholder* lainnya harus terus saling melakukan koordinasi. Namun lebih daripada itu, Ecky juga mendorong Bea Cukai Teluk Bayur untuk melakukan *upgrading* Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Bea Cukai Teluk Bayur baik penyidik maupun intelijen.

“Harus ada *upgrading* SDM aparat Bea Cukai baik intelijen maupun penyidik dari Bea Cukai. Karena, modus-modus penyelundupan barang ilegal tentu akan terus berkembang. Maka dari itu harus dilakukan upaya peningkatan SDM di tubuh Bea Cukai Teluk Bayur,” pesan Ecky. ■ pun/sf

BURT Dukung RS Hermina Padang Raih Akreditasi Tipe B



Tim Kunker BURT dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati bertemu dengan manajemen RS Hermina Padang. Foto: Erman/HR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Elva Hartati menyatakan

BURT akan mendukung proyeksi Rumah Sakit (RS) Hermina Padang dari RS tipe C menjadi RS tipe B. Hal tersebut sebagai salah satu upaya BURT DPR RI untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang terdiri dari Anggota DPR RI beserta keluarganya mendapat pelayanan terbaik dari pihak rumah sakit provider yang bekerjasama dengan PT. Jasindo sebagai mitra DPR RI.

“Biar semuanya bagus. Untuk pelayanan Jamkestama ini memang sebaiknya RS tipe B dan tipe A. Namun dikarenakan kerjasama dengan RS. Hermina ini baru ini 6 bulan, kita berharap secepatnya dilengkapi untuk fasilitasnya agar mendekati bahkan menyamai fasilitas RS tipe

B, walaupun secara akreditasi masih belum mencapai itu,” ungkap Elva usai pertemuan dengan Manajemen RS. Hermina Padang dan PT. Jasindo, di Ruang Rapat RS Hermina Padang, Sumatera Barat, Senin (22/7)

Politisi dapil Bengkulu ini juga meminta agar pihak RS Hermina Padang juga aktif melakukan sosialisasi kepada Anggota DPR RI serta keluarganya bahwasanya RS Hermina Padang adalah salah satu RS Provider yang melayani peserta Jamkestama. Mengingat kurun waktu 6 bulan, belum ada peserta Jamkestama dari DPR RI yang berobat maupun sekedar berkonsultasi ke RS tersebut.

“Pihak rumah sakit harus menyosialisasikan kepada keluarga Anggota DPR RI sebagai peserta Jamkestama, bahwasanya RS ini sudah bekerjasama dengan PT. Jasindo. Bisa dengan mendatangi keluarga-keluarga

Anggota DPR RI dapil sini, bisa dengan undangan, media sosial, cetak dan lain sebagainya,” saran legislator PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, mewakili Direktur RS Hermina Padang, Yanuar mengatakan memang RS ini memiliki proyeksi menjadi RS tipe B. Mengingat di Padang sendiri belum ada RS yg mencapai akreditasi tersebut (tipe B). Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan, ditambahkan Yanuar, RS Hermina Padang sudah sangat siap untuk pelayanan terhadap jamkestama.

“Dari sisi SDM, dokter spesialis dan fasilitas seperti CT scan, Pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) akan coba kita lengkapi. Mudah-mudahan dalam 1 hingga 2 tahun kedepan seiring perkembangan dan pertumbuhan RS Hermina Padang, kita akan coba kembangkan sampai memiliki akreditasi B,” tutup Yanuar. ■ es

SAA Harus Sadar Teknologi Demi Wujudkan Parlemen Modern

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa Staf Administrasi Anggota (SAA) DPR RI harus sadar teknologi. SAA diharapkan bisa memeriksa serta memperbarui kegiatan-kegiatan Anggota Dewan di *blog* atau *website* DPR RI, sehingga kegiatan dewan terpublikasi dan masyarakat tahu kinerja yang dilakukan oleh Anggota DPR RI. Hal ini sejalan dengan cita-cita DPR RI menjadi parlemen modern.

“Di era *internet of things* ini, mereka harus sadar teknologi. Sehingga mereka bisa memeriksa *blog* atau *website* DPR RI untuk mengisi setiap kegiatan-

kegiatan Anggota Dewan di dalamnya. Sehingga masyarakat tahu apa saja yang dilakukan Anggota Dewan,” tegas Indra usai membuka kegiatan orientasi SAA DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Indra menyayangkan dari 560 Anggota Dewan, hanya sepuluh persen yang mengisi *personal blog* di *website* DPR RI. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh SAA yang tidak membuka, serta mengisi kegiatan Anggota Dewan. Sehingga Indra berharap para SAA untuk mengecek dan mengisi *blog* Anggota Dewan, agar masyarakat tahu kegiatan Anggota Dewannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Minarko berharap melalui kegiatan orientasi ini, para SAA dapat mengetahui posisinya sebagai *supporting system* Anggota Dewan. SAA diharapkan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

“Jadi kami berharap nanti melalui orientasi ini, bapak ibu mengetahui posisinya. Karena bapak ibu sekalian sudah menjadi bagian dari *supporting system*, mengetahui posisinya dan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan,” harap Djaka. ■gre/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Odjie/HR

Museum DPR Beri Edukasi kepada Masyarakat Boyolali

Museum DPR RI ikut berpartisipasi dalam Pameran Pendidikan “Museum Hadir Di Sekolah” di Pendopo Ageng Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan 11 museum lainnya. Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR RI Endang Suryastuti mengatakan, melalui pameran ini, pihaknya memberikan berbagai pengetahuan dan sejarah tentang parlemen kepada para pengunjung, khususnya pelajar.

Dari hasil pantauan *Parlementaria*, pengunjung sangat antusias untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh anjungan Museum DPR RI. Baru hari pertama pameran dibuka, antusias pengunjung sudah luar biasa. Setidaknya ada 4000 pengunjung yang terdiri dari pelajar berbagai tingkat, seperti TK, SD, SMP dan SMA.

“Pada pameran, ini Museum DPR RI memberikan edukasi tentang sejarah dewan kemudian ada kuis-kuis yang menarik. Sehingga anak-anak memahami tentang DPR, tapi tidak dengan kebosanan. Justru mereka senang belajar sejarah,” kata Endang, di Pendopo Ageng Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/7).

Endang berharap, generasi muda memahami sejarah DPR, dan secara umum juga memahami sejarah bangsa. “Kami berharap anak-anak ini bisa memahami dewan secara lebih jelas. Kami juga ingin menggugah masyarakat, dan melihat citra DPR tidak lagi dipandang sebelah mata. Dengan pameran ini, mereka akan memahami kinerja DPR,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Boyolali Muhamad Said sangat mengapresiasi terselenggaranya



Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR RI Endang Suryastuti memberikan cenderamata kepada pelajar Boyolali.
Foto: Agung/HR

”

PADA PAMERAN, INI MUSEUM DPR RI MEMBERIKAN EDUKASI TENTANG SEJARAH DEWAN KEMUDIAN ADA KUIS-KUIS YANG MENARIK. SEHINGGA ANAK-ANAK MEMAHAMI TENTANG DPR, TAPI TIDAK DENGAN KEBOSANAN. JUSTRU MEREKA SENANG BELAJAR SEJARAH,”

Pameran Pendidikan ini. Berdasarkan pantauannya, para pelajar begitu antusias melihat dan mengikuti secara langsung pameran ini. Menurutnya, dengan terselenggaranya pameran ini dapat membangun nilai-nilai karakter anak-anak bangsa dan membangun kesadaran bahwa sejarah itu adalah bagian yang tidak boleh dilupakan.

“Nilai perjalanan sejarah adalah bagian yang penting. Dan tentunya tugas kita dan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Sehingga tidak hilang kesadaran mereka bahwa kita semua berdiri tegak di atas tanah yang kita cintai yang bernama Republik Indonesia. Maka cinta kepada Tanah Air adalah bagian yang terpenting. Menghormati jasa pahlawan para pejuang ini adalah bagian yang harus terus kita buka dan kita ajarkan,” jelasnya. ■ as/sf

RS Hermina Balikpapan Didorong Berikan Pelayanan Prima

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong Rumah Sakit (RS) Hermina Balikpapan, Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan yang prima, baik kepada pejabat negara yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dan masyarakat umum peserta BPJS. Usai meninjau berbagai fasilitas RS Hermina Balikpapan, sudah memenuhi syarat dalam memberikan layanan kepada peserta Jamkestama.

“Kita lihat Rumah Sakit Hermina sudah memenuhi syarat dan baik. Tetapi ada masukan bagi rumah sakit, mengenai pelayanan pasien BPJS. Kami berharap pembayaran yang

dilaksanakan (pemerintah kepada RS) bisa tepat waktu dan jangan menjadi kendala bagi rumah sakit. Karena ini menyangkut pelayanan bagi masyarakat banyak,” ungkap Novita saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau RS Hermina Balikpapan, Kaltim, Kamis (18/7).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, sebagai mitra kerja BURT dan operator Jamkestama, PT. Jasindo mesti menyiapkan *database* peserta dan melakukan koordinasi dengan RS *provider*, sehingga tugasnya dapat berjalan dengan baik. “Karena Jasindo tidak hanya melayani masyarakat secara umum, tetapi juga menangani pejabat negara seluruh Indonesia. Sehingga harus memilih rumah sakit yang memenuhi syarat, sehingga dapat

melayani dengan baik dan prima,” pesan Novita.

Sementara itu, Anggota BURT DPR RI Bakri mengapresiasi kiprah RS Hermina yang telah memiliki 32 RS tersebar di seluruh Indonesia, dan semua kerja sama dengan PT. Jasindo berjalan baik. Selain itu, sistem manajemen RS sangat baik dalam melayani masyarakat pengguna BPJS, melalui sistem yang tidak tergantung pembayaran premi BPJS. “Dengan kedatangan BURT, diharapkan dapat memotivasi rumah sakit dan dokter dalam memberikan pelayanan. Yang terpenting, Anggota DPR selalu menitipkan pesan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat umum juga harus sebaik-baiknya,” pesan politisi PAN itu. ■ as/sf



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti bersama Tim Kunker BURT meninjau fasilitas RS Hermina Balikpapan, Kaltim. Foto: Agung/HR



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Kampus Unnes, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (24/7). Foto: Oji/HR



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron, Kepala Pusat PUU BK DPR RI Inosentius Samsul, dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertema 'Tarik Ulur UU Pertanahan' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7). Foto: Hindra/HR



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha memberikan Sosialisasi LHKASN kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7). Foto: Grace/HR

